

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL  
PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**Febriyanti Hasan  
Johnny Hanny Posumah  
Joyce Jacinta Rares**

*In general, when people talk or hear the term Management Information System (MIS), then reflected in their minds is a system that was created to carry out-processing the data into information to be used by an organization or certain parties who need information about. Based on the identification of the problem, it can be formulated problems in this study, namely: "how the management of national land management information system (SIMTANAS) in support of the effective implementation of the tasks of land in the city of Ternate Land Office". This study aimed to describe the management of national land management information system (SIMTANAS) in support of the effective implementation of the tasks of land at the Land Office of Ternate.*

*Referring to the results of research, as has been noted in the previous section, it can be drawn some conclusions, as follows: The results showed that the implementation of the eight principles SIMTANAS at the offices of the Land of Ternate, in general has been running well, but has not been optimal so that some criteria / indicators that have not achieved the relevance, timeliness and consistency. The effectiveness of the implementation of the tasks of land, especially in the Land Office of Ternate, in general has been running as expected, although not yet reached the optimal result that some of the criteria effectiveness of the implementation of the tasks of the land has not been achieved, namely the ability of initiative, creativity and responsibility, satisfaction work, the quality and quantity of work. SIMTANAS support the effectiveness of the implementation of the tasks of land, especially in the Land Office Ternate pretty good, although not yet fully achieved. Not optimal SIMTANAS dikungan on the effectiveness of the implementation of the tasks indicated by the weak land some SIMTANAS performance indicators, such as relevansi, timely and consistency. Based on some of the results of all this research, it can put forward some suggestions as follows: In order to optimize the implementation of the principle of SIMTANAS at the Land Office of Ternate, it is necessary to spur the implementation of some of the principles that have not been achieved, the principle of relevance, timeliness and consistency. To optimize the effectiveness of the implementation of the tasks of land, it is necessary to accelerate the ability of initiative, creativity and responsibility, job satisfaction, quality and quantity of the work of employees, especially at the Land Office of Ternate. To increase the carrying capacity SIMTANAS on the effectiveness of the implementation of the tasks of land at the Land Office of Ternate, need to work on improving the performance of some of the principles SIMTANAS, such as relevance, timeliness and consistency by improving the system equipment and job skills training, both for power electronic engineering and power fieldworkers.*

*Keywords: National Land Systems*

## **PENDAHULUAN**

Dalam Era Globalisasi yang sering dikenal dengan era informasi dewasa ini, senantiasa melahirkan tantangan dan permasalahan dalam kehidupan organisasi yang semakin kompleks, jelas diperlukan suatu pola penanganan/pemecahan masalah yang benar-benar profesional dan akurat, maka kehadiran suatu Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang handal merupakan tuntutan yang mutlak diperlukan, terutama untuk memberi dukungan yang optimal bagi para

pimpinan organisasi untuk mengambil keputusan yang benar-benar efektif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa organisasi-organisasi dalam masyarakat modern sekarang ini, terutama organisasi/birokrasi pemerintah, tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan Sistem Informasi manajemen (SIM) yang handal, bahkan suatu SIM yang berbasis komputer.

Ledakan informasi tersebut menimbulkan dampak yang luas terhadap

kerumitan manajemen dan organisasi. Kenyataan tersebut menyebabkan organisasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya menerapkan manajemen informasi sebagai suatu sistem. Penyusunan informasi secara teratur dan sistematis mengikuti struktur organisasi dan digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan, merupakan inti dari sistem informasi manajemen (Mangkusubroto dan Tirnadi, 1987 : 8).

Asumsi di atas, menurut Moekijat (1994) sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi, di mana organisasi-organisasi menjadi bertambah luas, sehingga komunikasi yang berhadapan, dan bahkan catatan-catatan – dalam situasi organisasi tertentu – nampaknya tidak lagi menghasilkan komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, Davis (1992 : xv) berpendapat bahwa organisasi selalu membutuhkan sistem-sistem untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melihat kembali dan menyalurkan informasi untuk kepentingan manajemen. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi yang mampu melakukan proses-proses tersebut, yang dalam istilah ilmiah disebut sebagai “sistem informasi manajemen” atau SIM.

Kondisi ini sangat dimungkinkan karena kenyataan menunjukkan bahwa diberbagai instansi, terutama instansi pemerintah yang berfungsi sebagai penyedia informasi, sering terjadi perbedaan hasil pengelolaan data, bahkan dengan lajunya kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informasi dewasa ini, orang secara cepat dan mudah dapat mengakses informasi, namun masih banyak para pimpinan organisasi yang

kekurangan informasi yang berkualitas baik atau tinggi, padahal informasi yang memiliki kualitas tinggi akan sangat menentukan efektivitas keputusan-keputusan manajer/pimpinan organisasi.

Setiap pengambilan keputusan yang didukung dengan data dan informasi yang akurat (berkualitas tinggi), dapat dipastikan bahwa hasil keputusan tersebut memiliki derajat kualitas dan akseptabilitas yang tinggi. Tingginya kualitas dan akseptabilitas keputusan memudahkan pimpinan organisasi dalam mengimplementasikan keputusan-keputusan tersebut dan diharapkan berdampak signifikan bagi perkembangan kemajuan organisasi dan kepentingan anggota organisasi itu sendiri.

Pemerintah Kota Ternate, khususnya Kantor Pertanahan Kota Ternate sebagai objek penelitian ini telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) yang berbasis Teknologi Informasi (komputer), walaupun masih bersifat parsial. Artinya SIM yang ada di Kota Ternate hanya mampu menjalankan fungsi pengolahan, penyimpanan dan penyajian data elektronik secara parsial (sendiri-sendiri). Kondisi ini belum secara optimal memberikan dukungan kepada pimpinan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tugas-tugas pertanahan; dan SIM yang ada belum secara terbuka dapat diakses oleh pihak lain yang membutuhkan data dan informasi tentang pertanahan di Kota Ternate. Hal ini diindikasikan dengan website resmi yang diakses, ternyata data yang dibutuhkan tidak ditemukan oleh pengguna layanan. Dalam konteks inilah penulis tertarik untuk mengungkap efektivitas pengelolaan tugas-tugas pertanahan

dilihat dari dukungan SIMTANAS pada Kantor Pertanahan Kota Ternate, dalam rangka penyusunan skripsi ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif. Metode penelitian ini muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Dalam paradigma ini, realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Paradigma yang demikian disebut paradigma post-positivisme. Paradigma sebelumnya disebut paradigma positivisme, dimana dalam memandang gejala, lebih bersifat tunggal, statis, dan konkrit. Paradigma post-positivisme mengembangkan metode penelitian kualitatif, dan positivisme mengembangkan metode kuantitatif (Sugiyono, 2014).

Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode ethnographic, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2014).

Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut. (Sugiyono 1992).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh bersumber dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari data statistik pada Kantor Pertanahan Kota Ternate.

Teknik pengumpulan data adalah merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), *reliable* (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan).

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menghimpun data primer untuk mendukung penelitian serta melakukan pencarian data sekunder, baik yang berupa catatan-catatan, laporan-laporan, dokumen-dokumen, maupun literatur yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik orang-orang yang telah ditetapkan menjadi informan maupun kondisi riil yang didapat langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara.

Sumber data atau narasumber dalam penelitian ini dimaksud adalah informan sebagai sumber data atau narasumber penelitian kualitatif. Informan adalah orang-orang yang diamati dan memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti, baik berupa kata-kata atau tindakan, maupun pendapat yang dituangkan dalam bentuk panduan wawancara serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti.

Selain itu, sebagian informan ditentukan oleh informan lain berdasarkan

anggapan akan kemampuan dan wawasannya. Oleh karena itu, teknik pengumpulan datanya melalui *Snowball* atau *Chain Sampling*, yaitu mengidentifikasi kasus-kasus tertentu melalui sejumlah orang yang dihubungi secara berangkai. Selain itu juga, menggunakan teknik *Opportunistic Sampling*, yaitu menggambarkan kasus-kasus di lapangan dengan mewawancarai orang-orang yang terkait dengan kasus-kasus itu, tanpa direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan dua cara tersebut dalam menentukan informan, maka diperoleh informan kunci yang dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan :

- 1) Pada tingkat Instansi, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate, sebanyak 1 orang
- 2) Pada tingkat Kepala Bidang/Kepala Bagian dan kepala Seksi pada Kantor Pertanahan Kota Ternate, sebanyak 2 orang;
- 3) Pada tingkat pengguna layanan jasa dan informasi, sebanyak 7 orang.

Dengan demikian, jumlah informan ditetapkan sebanyak 10 orang.

Data yang telah diolah, berikutnya dianalisis dan diinterpretasikan

Berdasarkan variabel, gejala atau keadaan data yang telah di himpun melalui observasi, wawancara dan dokumen. Analisis data merujuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan dalam rangka penginterpretasi data, ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah penelitian (Sanapiah Faisal, 2001:33-34).

Tegasnya, dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses

penelitian berlangsung. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (2007)

Tahapan-tahapan analisis data sebagai berikut :

- a. Tahapan reduksi data. Dalam tahapan ini peneliti memeriksa seluruh data yang telah dihimpun melalui observasi, wawancara dan studi dokumen tersebut untuk di pilih dan di pilih berdasarkan sub-sub pokok bahasan sesuai dengan maksud penelitian.
- b. Tahapan penyajian data. Dalam tahapan ini peneliti menyajikan atau menganalisis berdasarkan data yang diperoleh dari objek penelitian. Penyajian data (*display data*) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisakan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

- c. Tahap kesimpulan/verifikasi. Langkah ini untuk menafsirkan atau memaknai hasil penelitian tersebut yang dimaksud untuk menarik kesimpulan terhadap data yang telah dilakukan dalam proses penelitian. Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.
- b. Mengkoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan; Pengendalian Pertanahan dan pemberdayaan Masyarakat; serta pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik Pertanahan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertanahan di lingkungan Provinsi;
- d. Mengkoordinasikan pemangku kepentingan pengguna tanah;
- e. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Provinsi;
- f. Mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan;
- g. Mengkoordinasikan Pengembangan sumberdaya manusia pertanahan;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana, dan prasarana, Perundang-undangan serta pelayanan pertanahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota, Kantor Pertanahan Kota Ternate adalah instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Pertanahan Kota Ternate, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana, Program, dan Penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan;
1. **Aspek Strategis Organisasi**
- Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diembannya Kantor Pertanahan Kota Ternate telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2015 yang memuat visi, misi, program dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2010-2015 berikut target output dan outcome yang akan dicapai.
- Renstra tersebut telah selaras dengan Renstra Badan Pertanahan Nasional dan diharapkan telah mencakup strategi penguatan Badan Pertanahan Nasional yang meliputi:
- a. Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta

peningkatan ketahanan pangan (*Prosperity*).

- b. Pertanahan berkontribusi secara nyata dalam peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) (*Equity*).
- c. Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air serta melakukan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari (*Social Welfare*).
- d. Pertanahan berkontribusi secara nyata bagi terciptanya keberlanjutan system kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat (*Sustainability*)

## 2. **Permasalahan Utama**

Permasalahan utama (*Strategic Issued*) pengelolaan pertanahan terdiri dari :

- a. Masih terbatasnya cakupan wilayah yang telah dipetakan kedalam peta dasar, peta tematik, dan peta nilai tanah sehingga berdampak dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah tidak dapat dilakukan percepatan karena masih terbatasnya peta dasar, dalam konteks peta

tematik belum dapat memberikan akses informasi yang lebih luas terutama untuk kepentingan investasi, seperti belum jelasnya batas administrasi wilayah, belum dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kemampuan tanah, ketersediaan lahan dan nilai tanah.

- b. Masih rendahnya jumlah bidang tanah yang terdaftar atau yang sudah diberikan legalitas sehingga belum memberikan kepastian hukum atas aset masyarakat, aset pemerintah dan aset badan hukum yang berdampak rentan terjadinya sengketa pertanahan serta tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi terutama dalam rangka penguatan modal usaha sehingga belum maksimal memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Terjadinya ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang berakibat pada ter konsentrasinya aset yang dikuasai oleh pemilik modal sehingga para petani tidak memiliki lahan untuk kegiatan usahanya, petani hanya menjadi buruh tani sekalipun petani memiliki tanah, tetapi sangat terbatas sehingga tidak mencukupi untuk kehidupan keluarganya.
- d. Harmonisasi Penataan Ruang dan Perizinan
  - 1) Harmonisasi kebijakan penataan ruang di daerah,

- pulau/kepulauan, kawasan-kawasan strategis dan penataan ruang nasional agar memberikan misi keadilan spasial bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan menyediakan ruang yang tepat dan layak, serta memastikan adanya partisipasi masyarakat pada proses penataan ruang dan perencanaan wilayah dan koordinasi penataan ruang antar wilayah. Sebagai bagian pula dari strategi ini adalah evaluasi kebijakan penataan ruang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Didamping itu diperlukan koordinasi untuk penyediaan peta pembangunan fungsi kawasan serta terpadu.
- 2) Perbaiki sistem dan pelaksanaan perizinan di bidang pertanahan melalui pendataan perizinan yang dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip keadilan bagi semua pihak.
- e. Banyaknya kasus-kasus pertanahan akibat sengketa dan konflik berpotensi terhadap timbulnya gejolak/kerawanan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan iklim investasi, Disisi lain bahwa lahan tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi karena tanah tersebut tidak produktif.
  - f. Masih sulitnya masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan di bidang pertanahan yang disebabkan oleh kondisi geografis, sarana transportasi, kemampuan ekonomi masyarakat, dan minimnya informasi tentang pelayanan pertanahan, sehingga program LARASITA sebagai Kantor yang bergerak yang didukung dengan penerapan Teknologi Informasi untuk mendekatkan pusat-pusat layanan pertanahan kepada masyarakat termasuk pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.
  - g. Pertumbuhan jumlah kantor sesuai dengan pertumbuhan wilayah administrasi kabupaten/kota yang jauh melebihi pertumbuhan jumlah pegawai sehingga pada beberapa kantor kekurangan staf dan terdapat jabatan-jabatan kosong.
  - h. Masih terbatasnya prasarana fisik sebagai penunjang kegiatan. Hal ini sangat mengganggu konsentrasi dalam bekerja mengingat sangat terbatas sarana dan prasarana kantor, bahkan masih ada Satuan Kerja yang tidak memiliki kantor.
  - i. Meningkatkan status Perwakilan Kantor Pertanahan menjadi Kantor Pertanahan definitif, untuk menyamakan mutu pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Tujuan SIMTANAS adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di bidang Pertanahan. Secara external SIMTANAS

bertujuan untuk membantu memudahkan masyarakat dalam proses mendapatkan informasi dari sisi waktu, biaya, tenaga, dan prosedur. Secara internal tujuan SIMTANAS adalah membantu pejabat struktural dalam memperoleh informasi tentang kinerja kantor berupa laporan secara cepat, akurat, dan aktual karena dikerjakan oleh sistem (bukan SDM) dan membangun kedisiplinan seluruh pegawai untuk memelihara dan konsisten terhadap aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) yang sudah dibangun BPN RI sehingga kualitas informasi pada SIMTANAS terjaga tetap cepat, akurat, dan aktual.

Kemajuan teknologi merupakan salah satu Cara untuk mengakses basis data dalam upaya membentuk terwujudnya pelayanan pemerintah yang berbasis elektronik (e-Gov.). Salah satu usaha untuk mengoptimalkan tugas-tugas pelayanan pertanahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi adalah pembangunan dan pengembangan komputerisasi kantor pertanahan (KKP). Kantor Pertanahan merupakan basis terdepan dalam kegiatan pelayanan.

Dikembangkan model pelayanan yang berbasis *on-line system*. Pembangunan pelayanan *on line*, membangun data base elektronik, pembangunan infrastruktur perangkat keras dan jaringan koneksi, peningkatan sumber daya manusia dalam kemampuan penguasaan IT serta sosialisasi kegiatan di kalangan intern dan ekstern merupakan tahap-tahap kegiatan yang harus dilakukan pada kantor-kantor yang sedang dan sudah menerapkan KKP.

Dilingkungannya Kantor Pertanahan Kota Ternate, pembangunan Sistem

Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada efektivitas pelaksanaan tugas-tugas dibidang pertanahan, seperti pemetaan lahan, penetapan status tanah dan pembuatan Sertifikat Tanah dan lain-lain.

Dari sisi Teoritis, dukungan SIMTANAS terhadap efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pertanahan sudah cukup baik, namun apabila dikaitkan dengan fakta empiri, masih perlu dilakukan perbaikan, pengembangan dan peningkatan pelaksanaan prinsip-prinsip SIMTANAS, khususnya pada Kantor Pertanahan Kota Ternate, yang meliputi beberapa indikator, yakni peningkatan pelaksanaan prinsip relevansi, tepat waktu dan konsistensi. Ketiga prinsip ini, dari hasil analisis data masih berada dibawah rata-rata capaian variabel Pelaksanaan SIMTANAS sehingga perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kinerja dari ketiga prinsip tersebut yang pada gilirannya akan mendorong atau mendukung secara optimal pencapaian efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pertanahan di Kota ternate.

## **Kesimpulan**

Mengacu pada hasil-hasil penelitian, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan delapan prinsip SIMTANAS pada kantor Pertanahan Kota Ternate, secara umum telah berjalan dengan baik, namun belum optimal sehingga masih menyisakan beberapa kriteria/indikator yang

belum dicapai yakni relevansi, tepat waktu dan konsistensi.

2. Efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pertanahan, khususnya pada Kantor Pertanahan Kota Ternate, secara umum telah berjalan sesuai yang diharapkan, walaupun belum mencapai hasil yang optimal sehingga masih menyisihkan beberapa kriteria efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pertanahan yang belum dicapai, yaitu kemampuan inisiatif, kreativitas dan tanggung jawab, kepuasan kerja, kualitas dan kuantitas hasil kerja.
3. Dukungan SIMTANAS terhadap efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pertanahan, khususnya pada Kantor Pertanahan Kota Ternate cukup baik, walaupun belum sepenuhnya dicapai. Belum optimalnya dukungan SIMTANAS terhadap efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pertanahan diindikasikan dengan masih lemahnya beberapa indikator pelaksanaan SIMTANAS, seperti relevansi, tepat waktu dan konsistensi.

### **Saran-Saran**

Berdasarkan beberapa hasil temuan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan prinsip SIMTANAS pada kantor Pertanahan Kota Ternate, maka perlu memacu pelaksanaan beberapa prinsip yang belum dicapai, yakni prinsip relevansi, tepat waktu dan konsistensi.
2. Untuk mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pertanahan, maka perlu memacu

kemampuan inisiatif, kreativitas dan tanggung jawab, kepuasan kerja, kualitas dan kuantitas hasil kerja pegawai, khususnya pada Kantor Pertanahan Kota Ternate.

3. Untuk meningkatkan daya dukung SIMTANAS terhadap efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Ternate, diperlukan adanya upaya peningkatan pelaksanaan beberapa prinsip SIMTANAS, seperti relevansi, tepat waktu dan konsistensi dengan membenahi system peralatan dan pelatihan keterampilan kerja, baik bagi tenaga teknik elektronik maupun tenaga peneliti lapangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Davis, B, G, 1992, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen* (Bagian Pertama), PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.-
- Mangkusubroto, K, dan C. L. Tirnadi, 1987, *Analisa Keputusan*, Penerbit Ganesa Exact, Bandung.
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 2007, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Moekijat, 1994, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Sanapiah Faisal, 2001, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan*

*Aplikasi, Yayasan Asih,Asah dan  
Asuh, Malang*

Sugiyono, 1992, *Metode Penelitian  
Administrasi*, Bandung, Alfabeta.

-----, 2014, *Memahami Penelitian  
Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.